

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2025

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJHATERAAN RAKYAT SETDA PROV.SULAWESI BARAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LKJIP BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... …… ...1

B. Uraian Singkat Organisasi .....…….4

1. Tugas dan Fungsi ……... …… 4

2. Sumber Daya Manusia…… ……..9

3. Keuangan……... ……..11

4. Sarana dan Prasarana……...11

C. Isu Strategis …….. ..……..12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran RPD..... 13

B. Rencana Strategis..... 14

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)……..17

D. Perjanjian Kinerja ..... .18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 20

B. Analisis Capaian Kinerja..... 23

C. Realisasi Anggaran 38

BAB IV PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.1 Kesimpulan 42
4.2 Saran 43

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan yang Maha Esa karena dengan rahmat dan kemudahan dari-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 dilakukan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance)*. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang terukur, objektif, dan akuntabel. Sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas umum untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan terpercaya, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu LKJiP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan semaksimalkan dilaksanakan. Sedangkan untuk lingkup internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 bisa menjadi media untuk meningkatkan capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJiP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Mamuju, 25 Februari 2026

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Raky

MURDANIL, SE., M.A.P
Pembina/ (IV/a)
NIP. 198101102009021003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LKJIP BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban kepada rakyat atas pelaksanaan tugas yang menggunakan anggaran negara. Hal ini diwujudkan dengan membangun sistem yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bisa menunjukkan capain kinerja yang terukur untuk memudahkan masyarakat menilai efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Sistem ini dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Sistem ini diatur lewat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LKJIP BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2025

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Sistem ini dibentuk dengan harapan akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance).* Tata kelola pemerintahan yang baik ini dapat terwujud jika terdapat keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang terukur, objektif dan akuntabel. Hal tersebut yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini berpedoman ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP berdasarkan dan bersesuaian dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Sulawesi Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (legislatif, eksekutif, dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKJiP ini bertujuan untuk:

1. Mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan sebagi bagian dari upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik (*Good Governance*);
2. Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pikay yang terkait kepada instansi pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana stratejic yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan;
5. Sebagai media untuk menilai capaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintan (LKJiP) selain diiharapkan dapat menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKJiP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendukung Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas umum untuk pemerintahan yang mendukung bersih dan terpercaya, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Sulawesi Barat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat di Sulawesi Barat terhadapat penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

B. Gambaran Umum Biro Pemerintahan dan Kesra

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawei Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kedukukan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu bagian dalam Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Secara khusus Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibawahi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan, hukum serta organisasi perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawei Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang otonomi daerah;
b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
e. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait;
f. pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

a. **Bagian Pemerintahan**

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataanwilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha.

Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha ;
b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pemerintahan terdiri atas:

1) Subbagian Tata Usaha Biro;
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:

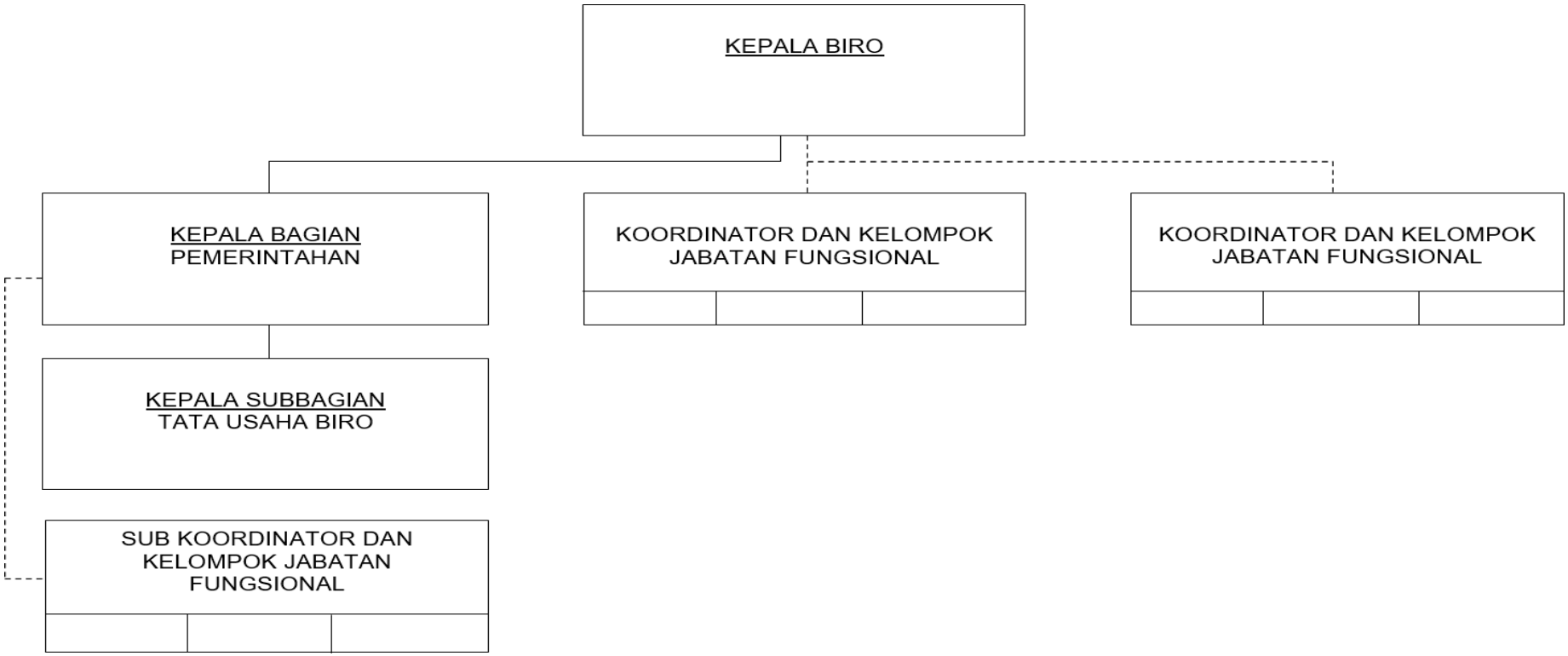
a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
d. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
g. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
h. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
i. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
j. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenagan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan tugas sebuah organisasi tidak bisa dilepaskan dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti perencanaan yang baik, dinamika perubahan lingkungan strategis hingga aspek sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang memadai dan berkompetensi diharapkan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Untuk menunjuang pelaksanaan tugas Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 didukung oleh 42 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.Jumlah ASN Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Kelompok Jabatan

JPT	PEJABAT ADMINISTRATOR	PEJABAT PENGAWAS	PEJABAT FUNGSIONAL	PEJABAT PELAKSANA	JUMLAH
1	1	1	14	26	42

Penambahan jumlah ASN pejabat Fungsional cukup signifikan dengan dilaksanakannya pengalihan pejabat structural ke pejabat funsional untuk melaksanakan mandat dalam perampingan birokrasi sehingga diharapkan proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

birokrasi yang Panjang dan berbelit dapat dipotong menjadi lebih singkat yang berdampak pada pelayanan public yang lebih cepat dan prima.

Pada tahun 2022 pengalihan ini membutuhkan proses adaptasi yang tidak mudah dan butuh penyesuaian baik individu maupun organisasi. Hal ini cukup berdampak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, mulai dari perubahan kebijakan dengan keluarnya peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Perangkat Daerah yang mengubah struktur Organisasi tanpa mengubah peran dan fungsi.

Hal ini juga berlaku pada pelaksanaan tugas di tahun 2025, Dimana seluruh ASN telah berusaha bertanggungjawab dan mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai kebijakan pimpinan dan aturan yang berlaku.

Tabel 2. Komposisi ASN Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Golongan

IVc	IVb	IVa	IIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IIc	IIb	IX (PPPK)
1	3	1	14	9	8	2	1	-	2	1

Tabel 3 Komposisi ASN Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

SMA	D3	S1	S2
7	2	21	11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebesar Rp. 18.243.515.521,- ,(Delapan Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Kima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Anggaran pada tahun 2024 turun sekitar 19,8% dari anggaran Tahun 2023 Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat TA 2024 untuk membiayai 3 (tiga) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub kegiatan.

4. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel 4

Sarana dan Prasarana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Lemari Besi	2	Baik
2	Filling Besi/metal	2	Baik
3	Alat Pendingin lemari es	2	Baik
4	Dispenser	1	Baik
5	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	Baik
6	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik
8	Kursi rapat kerja Eselon II	12	Baik
9	Band kas	1	Baik
10	Lemari Kayu	1	Baik
11	Meja Rapat	1	Baik
12	Kursi Rapat	22	Baik
13	Sofa	2	Baik
14	Pendingin Ruangan/AC	5	Baik
15	Televisi	2	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16	Soundsystem	1	Baik
17	Handy Cam	2	Baik
18	Computer PC	8	Baik
19	Laptop	11	Baik
20	Printer	11	Baik
21	Stabilizer	1	Baik
22	Server	1	Baik
23	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Baik
24	Meja Kera	26	Baik
25	Kursi Kerja Eselon II	3	Baik
26	Kursi Kerja Eselon III	5	Baik
27	Kursi Kerja Eselon IV	6	Baik
28	Kursi Kerja Non Eselon	12	Baik
29	Lemari Arsip Dinamis	3	Baik
30	Proyektor+Attachment	1	Baik
31	Audio Catrige Recorder	1	Baik
32	Microphone/Wereles Mc	2	Baik
33	Peralatan Studio visual lainnya		Baik
34	Camera Elektronik	1	Baik
35	Camera Digital	3	Baik
36	Serial Scener	1	Baik

C. Isu Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu 2023 – 2026 yakni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Belum Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. faktor Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

1. Belum Optimalnya Penyusunan dan Penilaian LPPD;
2. Belum Optimalnya Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru;
3. Belum Optimalnya fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD;
4. Belum Optimalnya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota;
5. Belum optimalnya fasilitasi kerjasama daerah ;
6. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan;
7. Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan Sasaran RPD

Pelaksanaan pemerintahan di tingkat provinsi memiliki peranan yang berbeda dengan pemerintahan pusat maupun pemerintah kabupaten kota. Dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan harus diperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Namun, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diinstruksikan kepada Gubernur agar menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2005-2025.

Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 trntang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2025 sebagai pedoman dan dasar penyusunan Renstra yang dilakukan perangkat Daerah dalm Menyusun rencana pembagunan pada peiode tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Biro Pemerintahan dan kesra berkontribusi pada tujuan ke-4 yakni mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dengan sasaran meningkatnya Pelayanan public yang responsive dan berdaya saing dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik.

Adapun tujuan Biro Pemerintahan dan Kesra yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPD 2023-2026 yakni penyusunan Kebijakan daerah bidang Pemerintahan, otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.

B. Rencana Strategis

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu bagian dari Sekretariat Daerah menjadi pendukung bagi urusan penunjang khususnya terkait pemerintahan umum dan pemerintahan daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi.

Berdasarkan perumusan tujuan Biro pemkesra, maka biro pemkesra merumuskan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis sesuai RPD Tahun 2023-2026, yaitu:

1. Optimalnya Pelayanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Biro Pemkesra didukung oleh arah kebijakan:

1. Optimalisasi koordinasi terhadap penataan batas dan Kerjasama daerah
2. Peningkatan Poin LPPD;
3. Optimalisasi koordinasi di bidang otonomi daerah;
4. Optimalisasi fasilitasi perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, maka Biro pemkesra secretariat Daerah Sulawesi barat menetapkan Program dan kegiatan tahun 2025, sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Program Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan

1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
3. Fasilitasi Kerjasama Daerah;
4. Fasilitasi Pembinaan mental spiritual;
5. Fasilitasi Penegmebangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
6. Fasilitasi Penegmebangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10. Administrasi Barang Milik Daerah Daerah
11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12. Administrasi Umum Perangkat Daerah
13. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen pengukur keberhasilan strategis yang mengonversi visi dan misi organisasi menjadi parameter kuantitatif yang terukur, objektif, dan akuntabel, guna memastikan bahwa setiap program kerja di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tidak hanya berhenti pada pemenuhan aktivitas administrasi semata, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata (*outcome*) terhadap perbaikan tata kelola wilayah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terdokumentasi secara transparan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen IKU.

Tabel 5

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Penanggung jawab
1.	Meningkatkan Evektifitas tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan (Nilai SPM)		Bagian Pemerintahan
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat (Persentase Jumlah Penerima Beasiswa)	Pengukuran Kinerja dapat diukur dari jumlah penerima Beasiswa Tahun n dibagi dengan target sesuai DPA Tahun n dikali 100 (serratus) persen	Bagian Kesejahteraan Rakayt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sub Bagian Tata Usaha
		Nilai Indeks SPBE	Hasil Penilaian DInas Komunikasi, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai SK Gubernur	Sub Bagian Tata Usaha
		Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran tahun 2025	Sub Bagian Tata Usaha
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN	Nilai IP ASN Tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian BKD	Sub bagian Tata Usah

D. Perjanjian Kinerja

Di tahun 2024, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjalankan 3 Program pendanaan dari APBD dengan 6 Indikator Kinerja. Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdapat 2 Indikator Kinerja yang menargetkan realisasi Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan sebesar 100% serta Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 100%. Dalam Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdapat 3 indikator kinerja yang menargetkan Nilai SAKIP Lingkup OPD sebesar 78,7 Poin, Tingkat Capaian Kinerja Anggaran 99,40%, Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD sebesar 3,75. Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 dituangkan pada table berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) Biro Pemerintahan dan Kesra Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	*2*	*3*		*4*
1.	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 persen
		2	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 persen
2.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Nilai SAKIP Lingkup OPD	78,7 poin
		2	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	99,40
		3	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	100 persen
		4	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD	3,75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran sebuah kinerja tentu memiliki sebuah mekanisme. Mekanisme ini dibuat untuk memastikan bahwa kinerja sebuah organisasi tersebut benar-benar bisa diukur. Dalam upaya mengukur Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintan (LKJiP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dimanfaatkan mekanisme yang melibatkan aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan yang memanfaatkan semua sumber daya pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjanikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJiP) sebagai bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuruan ini selanjutnya dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran yang ditetapkan saat perencanaan dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui *performance gap* atau selisih antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan. *Performance gap* ini kemudian akan menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja di waktu mendatang.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan untuk mengukur persentase capaian kerja untuk setiap indikator sasaran. Setiap indikator sasaran ini memiliki nilai ukur masing-masing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sehingga rumus diatas digunakan dengan disesuaikan dengan nilai ukur dari masing-masing sasaran.

Tabel 6

Kategori Pencapaian Kinerja

No	Nilai Angka	Interpretasi
1	>85 – 100	Memuaskan
2	>75 – 85	Sangat Baik
3	>65 – 75	Baik
4	>50 – 65	Cukup
5	>30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel Kategori Pencapaian Kinerja dibuat untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dari persentase capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2025.

Capaian kinerja diukur untuk mendapatkan data yang akan dijadikan input dalam penyusunan rencana kerja di waktu mendatang. Capaian kinerja diukur berdasarkan kerangka pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7

Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%	Memuaskan
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	102%	100%	Memuaskan
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai SAKIP OPD	78,7	77 %	98,48 %	Memuaskan
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	99,40 %	87,01%	87,53 %	Memuaskan
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	100 %	79,19	79,19%	Sangat Baik
		Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD	3,75	3,74	99,73 %	Memuaskan
				Nilai	94,15 %	Memuaskan

Memperhatikan hasil capaian kinerja sampai akhir tahun 2025 antara target indikator kinerja dan realisasi kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sekretariat Daerah nampak Sebagian besar indikator yang direncanakan berhasil dicapai dengan cukup optimal sesuai target .Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan dan komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan program kegiatan dengan efektif dan efisian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian ini diwujudkan dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten serta instansi vertikal berdasarkan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebab banyaknya fungsi fasilitasi yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, penilaian kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibatasi sampai pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2006; dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berpedoman pada tupoksi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024; dokumen Rencana Pembangun Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang kemudian capaian ini dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

Tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bagian dari Sekretariat Daerah pada pemerintah provinsi lebih banyak berperan mendukung koordinasi dan sinkronisasi pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten. Fasilitasi ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

fungsi Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Rincian capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang disajikan berikut disusun berdasarkan target dan perbandingan kinerja dari tahun sebelumnya dari masing-masing indikator kinerja utama yang dituangkan di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dapat tergambarkan dalam evaluasi berikut.

A. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan

1. Capaian Indikator Kinerja 1 : Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan

Tabel 8

Target dan Realisasi IKU 1 Tahun 2025

Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
	100%	100%	100%

Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dengan Target 100 % dengan realisasi pencapaiannya yakni 100 % , sehingga dapat dikatakan bahawa indikator persentase pengelolaan administrasi kebijakan Bidang pemerintahan telah mencapai target dan capainnya masuk dalam kategori Memuaskan. Persentase ini berasal dari hasil penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tahun ini mencapai 77,79% dengan target 100%.

Capaian Kinerja ini mencakup tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam hal fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum dalam hal penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sulawesi Barat. Adapun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase hasil penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tahun 2025 mencapai 77,79% dengan target 100%. Adapun bobot Penilaian SPM secara umum meliputi Mutu layanan (80%) dengan focus pada kualitas pelayanan, sarana, prasarana serta kompetensi tenaga pelaksana dan Cakupan layanan (20%) dengan focus pada kuantitas atau persentase masyarakat sasaran yang menerima layanan.

Tabel 9

Perbandingan persentase capaian kinerja indikator pengelolaan administrasi kebijakan bidang Pemerintahan (SPM)

Capaian SPM Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2024	100	46,42	46,42
2025	100	77,79	77,79

Dari table tersebut diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian penilaian SPM dari tahun 2024 yang hanya 46,42 % menjadi 77,79% ditahun 2025. Hal ini menandakan bahwa adanya keseriusan dari selutuh Tim penerapan SPM terutama perangkat Daerah pengampu sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.

Dibidang pemerintahan dan Otonomi Daerah juga termasuk, fasilitasi kerjasama, Penyusunan Dokumen LKPJ, Penyusunan LPPD serta, Fasilitasi Penataan Batas Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.Adapun penjelasan dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- **Fasilitasi Kerja sama Pemerintah Daerah**

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan fungsinya mendukung pelaksanaan kerjasama daerah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi. Dukungan ini dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan memfasilitasi kerjasama lewat rapat, forum koordinasi hingga draft kerjasama terbentuk. Namun pengesahan kerjasama menjadi produk hukum yang menjadi tupoksi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga hal ini menuntut Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menindaklanjuti semua permintaan fasilitasi kerjasama yang masuk dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk bisa menghasilkan Perjanjian Kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sulawesi Barat.

Pada Tahun 2024, Kerjasama dan Mou yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Kesra meningkat dibanding tahun sebelumnya. Beberapa diantaranya yakni, Kerjasama antar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kaikokai Healthcare Corporation Jepang terkait rencana Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kejati Sulbar, MoU-PKS antara Pemerintah provinsi Sulawesi Barat dengan Unhas-UNM , serta Kerjasama dengan 15 Perguruan tinggi.

Pada tahun 2025, Kerjasama dan Mou yang difasilitasi oleh Biro pemerintahan dan kesra antara lain, Kerjasama Universitas STAIN Majene dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait beasiswa, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembangunan dan Pengembangan Daerah, PKS antara pemerintah Sulawesi Barat dengan BPJS Kesehatan tentang jaminan Sosial Kesehatan, Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Prov. Sulbar dengan Perguruan Tinggi, MoU antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan BAZNAS Kabupaten Se Sulawesi Barat, perjanjian Kerjasama antara pemerintah Prov. Sulbar dengan Mitra Swasta tentang program *Corporate Social Responcibility (csr)* dalam pencegahan-penanganan stunting dan kemiskinan terpadu di Provinsi Sulbar tahun 2025-2030.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Biro Pemkesra juga telah melaksanakan Rapat Inventarisasi Kerjasama Dimaksud sebelum penandatangan Kerjasama dan MoU dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 2.
Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Sulawesi Barat dengan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten se Sulawesi Barat

Meski capaian kinerja terkait fasilitasi kerja sama ini sudah sangat baik, namun dalamnya masih ada sejumlah kendala. Salah satu kendalanya adalah belum adanya perda yang mengatur SOP Fasilitasi Kerjasama yang menjelaskan syarat dan kelengkapan dokumen. Selain itu ketersediaan data sektoral yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama masih kurang. Data yang tersedia masih banyak berupa data makro sehingga ini membuat proses Kerjasama terhambat. Padahal data-data ini penting dalam membuat perencanaan kerjasama yang efektif.

- **Fasilitasi Layanan Administrasi Pemerintahan Umum**

Perubahan nomenklatur Biro Tata Pemerintahan menjadi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyebabkan perubahan disejumlah tugas dan fungsi. Namun perubahan terkait kewenangan provinsi tidak mengalami perubahan yang signifikan khususnya terkait nomenklatur pelayanan administrasi maupun fasilitasi yang menjadi tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Perubahan ini membuat pelaksanaan urusan terkait penata kelolaan tanah yang jadi kewenangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah bergesar sehingga lebih sempit. Peran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat lebih banyak terlibat pada perumusan kebijakan. Sedangkan teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pembebasan dan pelaksanaan penata kelolaan tanah telah bergeser ke Dinas lain yang menangani.

Namun Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat masih terlibat dalam fasilitasi dalam perumusan kebijakan serta berbagai tugas yang sehubungan dengan pemerintahan umum. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun saat teknologi informasi menjadi pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini juga membuat fasilitasi administrasi yang menjadi kewenangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berjalan simultan baik secara daring maupun luring.

Seluruh permintaan fasilitasi pemerintahan yang masuk segera diproses dan dilimpahkan sesuai dengan kewenangan di internal Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan berkoordinasi dengan instansi lain yang terlibat.

- **Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan cermin efektivitas tata kelola pemerintahan. Jika kita melihat data dari tahun 2022 ke 2023, terdapat dinamika yang cukup kontras yang memerlukan perhatian serius dalam evaluasi kebijakan ke depan. Berikut Capaian Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun 2022 dan 2023:

Tabel 10.

Capaian Indeks Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Indeks LPPD Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2022	3,0	2,68	89,3
2023	3,14	1,39	44,26

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022, capaian kinerja berada pada tingkat yang cukup stabil dengan realisasi **2,68** dari target **3,00**. Namun, pada tahun 2023, terdapat tantangan signifikan di mana realisasi turun menjadi **1,39** dari target yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

justru meningkat menjadi **3,14**. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala, baik dari sisi administratif, pengumpulan data dukung, maupun eksekusi program di lapangan yang perlu segera diidentifikasi akar masalahnya

Dengan ini, perlu dilakukan audit internal terhadap penginputan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk memastikan tidak ada data dukung yang *reject* oleh tim validator pusat serta Penguatan Tim Penyusun LPPD dan sinkronisasi data antar-OPD sejak awal triwulan pertama sangat krusial untuk mengembalikan angka realisasi ke level optimal.

2. Capaian Indikator 2 : Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tabel 14

Target dan Realisasi IKU 2 Tahun 2025

Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
	100%	100%	100%

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan sebuah organisasi baru yang terbentuk sebagai hasil dari perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait organisasi pemerintahan daerah. Sejumlah indikator ditetapkan dalam menetapkan bentuk dan fungsi organisasi pemerintah daerah termasuk di dalamnya Sekretariat Daerah Provinsi.

Penyederhanaan Birokrasi juga telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 dimana nomeklatur beberapa jabatan structural berubah menjadi fungsional. Namunh hal ini tidak tdk begitu berpengaruh terhadap kinerja ASN terutama dalam pelaksanaan tugas mereka sebelumnya. Proses adaptasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada tahun 2024 hingga 2025 masih terus berlangsung, dan akan jauh lebih baik dengan semakin luasnya pemahaman atas perubahan nomenklatur ini.

- **Pengelolaan Administrasi Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual**

Proses adaptasi atas perubahan nomenklatur jabatan sudah dapat diatasi dengan baik. Ini membuat fungsi fasilitasi yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait urusan keagamaan juga semakin efektif

Pada Tahun 2025, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan fasilitasi MTQ Tingkat provinsi hingga Nasional. Kafilah Sulawesi Barat ikut berlaga dipelaksanaan STQ Nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian atas kinerja ini cukup baik, Dimana pada tahun ini kafilah Sulawesi Barat meraih Juara harapan 1 dari Cabang Hifzil Qur'an gol. 10 Juz putri. Sulawesi juga mencatat adanya peningkatan dari segi Peringkat Nasional. Tahun 2018 peringkat 34, tahun 2020 peringkat 30, tahun 2022 peringkat 24, tahun 2023 naik ke peringkat 20 dan di Tahun 2024 berada di peringkat 22 dari 35 Provinsi. Di tahun 2025, provinsi Sulawesi barat tidak memenangkan satu kategoripun dalam STQ Tingkat nasional di Sulawesi Tenggara, namun seluruh peserta sudah menampilkan yang terbaik dalam ajang tersebut. Hal ini menjadi PR buat Panitia hingga peserta MTQH/STQH Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan Motivasi dalam perhelatan MTQ Nasional berikutnya.

Selain itu fasilitasi hibah juga berlangsung cukup baik. Tercatat 21 penerima hibah baik itu Rumah ibadah, Badan dan Lembaga,Nirlaba sukarela dan social dengan telah tercatat pada Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan lain seperti pelatihan imam hingga Dzikir akbar di akhir tahun 2025 yang dilaksanakan di Masjid Baitul Anwar, Kompleks Perkantoran Provinsi Sulawesi Barat juga berjalan dengan baik.

- **Pengelolaan Administrasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non-Pelayanan Dasar**

Tahun 2023 ini, pelaksanaan kegiatan semakin baik ditambah dengan dukungan ASN yang berkompeten dibidangnya. Upaya koordinasi dioptimalkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan aktifnya ASN Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat turun ke perangkat Daerah yang terkait untuk menyampaikan kesiapan dan kesediaan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mendukung dan membuat kebijakan dalm pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah teknis, khusunya terkait isu-isu kesejahteraan rakyat non-Pelayanan dasar. Perangkat daerah yang ditemui seperti Badan Perencanaan Pembnagunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pariwisata provinsi Sulawesi Barat, hingga Pengadilan Agama Sulawesi Barat.

Hal ini menunjukkan keseriusan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung terwujudnya kebijkan yang dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu sosial di masyarkat dan isu strategis Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Dilakukan pula intervensi penanganan stunting oleh Biro Pemerintahan dan Kesra melalui Rapat Koordinasi Bersama perangkat Daerah teknis terkait. Adapun OPD yang menjadi leading sektor penanganan stunting, yakni Badan Perencanaan Pembnagunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat,Dinas Kesehatan Kabupaten, BKKBN provinsi Sulawesi Barat, Bagian Kesra Kabupaten, dan satgas penurunan Stunting provinsi Sulawesi Barat.

Tahun 2024, Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang melekat pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar. Realisasi anggaran pada kegaitan penyaluran Bantuan beasiswa Capaian kinerja anggaran hanya mencapai 83,47 % dari target 98,99 % yang ditetapkan pada Renja Tahun 2024. Beberapa faktor diantaranya yakni kendala dalam proses pendaftaran dan seleksi penerima beasiswa dari segi kinerja aplikasi hingga proses verifikasi berkas calon penerima beasiswa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2025, penyaluran bantuan Beasiswa yang masuk dalam 4 kategori, yakni beasiswa Tidak Mampu, Beasiswa Prestasi Akademik, Beasiswa Prestasi Non Akademik dan Beasiswa Kepemimpinan Muda yang masing-masing memiliki syarat khusus. Berdasarkan data terbaru dari Tim beasiswa bahwa penyaluran bantuan tahun 2025 mencatatkan keniakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 11

Perbandingan Jumlah penerima Bantuan Beasiswa Sulawesi Barat

Jumlah Penerima Bantuan BeasiswaTahun	Target	Realisasi	% Capaian
2024	300	277	92,33
2025	514	537	104

Dari table diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Penerima manfaat beasiswa dari capaian tahun 2024 yang sebesar 92,33% menjadi 104% di tahun 2025, hal ini juga dipengaruhi oleh penambahan anggaran oleh Gubernur Sulawesi Barat untuk meningkatkan kepercayaan dan prestasi mahasiswa asal Daerah Sulbar serta adanya Program Beasiswa Afirmasi dengan Universitas Sulawesi Barat Fakultas Kedokteran dengan Jumlah Mahasiswa sebanyak 26 orang.

Harapan Gubernur Sulawesi Barat untuk program Beasiswa kepada putra asal daerah dengan semangat kolaborasi, optimis bahwa angka partisipasi Pendidikan tinggi disulbar terus merangkak naik membawa daerah kita sejajar dengan Provinsi maju lainnya dan memastikan bahwa peningkatan kuantitas akan diikuti dengan pendampingan bagi para penerima agar mapu menyelesaikan studi tepat waktu dan Kembali membangun tanah Sulawesi Barat.

a. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Capaian Indikator Kinerja 3 : Nilai SAKIP OPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 12

Target dan Realisasi IKU 3 Tahun 2025

Nilai SAKIP OPD	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
	78,7 Poin	77 Poin	97,83%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dalam Poin Penilaian SAKIP Tahun 2025 masuk dalam kategori Memuaskan yakni 97,83 % dengan realisasi 77 poin dengan target 78,79 poin.

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja IKU 3

Nilai SAKIP OPD	Target	Realisasi	% Capaian
2023	69,25	71,50	103,24
2024	66,5	72,75	109,39
2025	78,7	77	97,83

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan tabel di atas, Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dari tahun ke tahun naik. tahun 2023, nilai Biro Pemerintahan dan Kesra akhirnya mendapatkan Nilai BB. Tahun 2024 nilai Biro Pemkesra Kembali mengalami peningkatan dari nilai ditahun sebelumnya yakni sebesar 72,75 Poin dengan predikat B,namun ditahun 2025 ada penurunan yakni sekitar 13% dari tahun sebelumnya, namun secara poin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

nilainya naik yakni menjadi 77 Poin, sehingga hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan misi organisasi dan diharapkan meningkat lagi di tahun berikutnya..

2. Capaian Indikator 4 : Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD

Tabel 14

Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2025

Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
	99,40%	87,01%	87,53%

Dari tabel diatas, serapan anggaran pada tahun 2025 meningkat dibanding Tahun sebelumnya. Capaian kinerja anggaran mencapai 87,01% , meningkat sekitar 3,54%. Salah satu penyebabnya yakni Realisasi anggaran Penyaluran Beasiswa Provinsi Sulawesi Barat yang hanya mencapai 51, 56 % dikarenakan berbagai faktor diantaranya kendala dalam proses pendaftaran dan seleksi penerima beasiswa dari segi kinerja aplikasi hingga proses verifikasi berkas calon penerima beasiswa dan adanya efisiensi anggaran.

Tabel 15

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja IKU 4

Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Realisasi Kinerja					
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
	95,3%	91,59%	82,63%	99,40	87,01	87,53

Tahun 2023, serapan anggran Kembali menurun. Capaian kinerja anggaran hanya mencapai 91,59% dari target 100% yang ditetapkan. Hal ini terjadi diluar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kendali Biro Pemerintahan dan Kesra. Salah satu anggaran yang juga rendah serapannya adalah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum.

Tahun 2024, serapan anggaran menurun cukup tinggi. Capaian kinerja anggaran hanya mencapai 83,47 % dari target 98,99 % yang ditetapkan pada Renja Tahun 2024. Salah satu penyebabnya yakni Realisasi anggaran Penyaluran Beasiswa Provinsi Sulawesi Barat yang hanya mencapai 51, 56 % dikarenakan berbagai faktor diantaranya kendala dalam proses pendaftaran dan seleksi penerima beasiswa dari segi kinerja aplikasi hingga proses verifikasi berkas calon penerima beasiswa.

Tahun 2025, dari seluruh program kerja yang telah ditetapkan untuk mencapai target/sasaran, Biro Pemkesra menerima pendanaan yang bersumber dari APBD denagn Pagu anggaran sebesar Rp.18,243,515,521 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15,873,667,078 dengan persentase sebesar 87,01 %.

5. Capaian Indikator 5 : Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD

Tabel 16

Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2025

Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian
	100%	79,19	79,19%

Seiring dilakukannya pemetaan dalam pengalihan jabatan dari structural dan fungsional telah dimaksimalkan hampir diseluruh instansi Pemerintahan di Sulawesi Barat termasuk Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Namun hal ini tidak mempengaruhi kinerja ASN terutama dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Jabatan baru yang diembannya.

Adapun persentase Tata Kelola manajemen ASN biro Pemkesra berasal dari nilai Indeks profesionalitas Rata-rata seluruh peagawai di tahun 2025 yakni sebesar 79,17. Hal ini dipengaruhi oleh nilai dari emapt pilar utama penilaian IP ASN seperti kualifikasi Pendidikan, Kompetensi,Kinerja dan Disiplin beberapa ASN. Oleh karena

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

itu, diharapkan untuk tidak hanya mengejar angka, tetapi membuktikan kualitas agar seluruh pemenuhan evidence dari empat pilar tersebut bisa bermanfaat.

Pada tahun 2025, capaian kinerja ini cukup optimal dengan sejumlah ASN yang mengkuti pelatihan, diklat, *workshop*, maupun bimbingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Kegiatan pengembangan ASN saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi My ASN dimana seluruh pelatihan yang telah diikuti oleh ASN dapat mempengaruhi nilai IP (Indeks Profesionalitas) ASN yang menjadi salah satu indicator penilaian SPBE tahun 2024 dan mempengaruhi IP ASN provinsi Sulawesi Barat secara Nasional.

6. Capaian Indikator 6 : Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD

Tabel 17

Target dan Realisasi IKU 6 Tahun 2025

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**% capaian**
	3,75	3,74	99,73%

Adapun nilai Indeks SPBE atau hasil evaluasi tahun 2023 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat masuk dalam deretan angka 1,98 dengan Predikat Cukup. Hal ini menandakan bahwa Awal diterapkan kebijakan penialaian SPBE di seluruh OPD dengan terbatasnya kompetensi dan kurangnya pemahaman digital beberapa ASN yang menyebabkan rendahnya hasil penilaian evaluasi SPBE di tahun 2023 ini.

Tahun 2024 Nilai evaluasi SPBE Biro Pemerintahan dan Kesra meningkat di angka 3,20 dengan predikat Baik. Hal tersebut menandakan adanya kesadaran seluruh personal pada Biro pemkesra, komitmen pimpinan yang kuat terhadap implementasi SPBE, pengembangan Infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

layanan digital, peningkatan kapasitas SDM hingga Kolaborasi dan sinergi antar Tim dan seluruh personil perangkat daerah.

Tabel 18

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja IKU 6

Tahun Penilaian	Indeks SPBE	Kategori
2023	1,98	Cukup
2024	3,20	Baik
2025	3,74	Sangat Baik

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan atas pencapaian indeks/Nilai SPBE dari Tahun 2023 hingga tahun 2025 Biro Pemkesra. Dapat disimpulkan bahwa perubahan indeks/nilai tersebut dipengaruhi oleh perubahan terhadap pedoman dan evaluasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik provinsi Sulawesi Barat.

Indikator ini, merujuk pada pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terdiri dari 8 Manajemen SPBE, yakni Risiko, keamanan Informasi, data,aset, teknologi informasi dan Komunikasi, Sumber daya manusia, perubahan dan layanan).

Adapun nilai Indeks SPBE atau hasil evaluasi tahun 2023 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat masuk dalam deretan angka 1,98 dengan Predikat Cukup. Hal ini menandakan bahwa Awal diterapkan kebijakan penialaian SPBE di seluruh OPD dengan terbatasnya kompetensi dan kurangnya pemahaman digital beberapa ASN yang menyebabkan rendahnya hasil penilaian evaluasi SPBE di tahun 2023 ini.

Tahun 2024 Nilai evaluasi SPBE Biro Pemerintahan dan Kesra meningkat di angka 3,20 dengan predikat Baik. Hal tersebut menandakan adanya kesadaran seluruh personal pada Biro pemkesra, komitmen pimpinan yang kuat terhadap implementasi SPBE, pengembangan Infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi dan layanan digital, peningkatan kapasitas SDM hingga Kolaborasi dan sinergi antar Tim dan seluruh personil perangkat daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tren positif tersebut berlanjut hingga tahun 2025, di mana indeks SPBE berhasil mencapai angka 3,74. Dengan skor ini, instansi kini resmi masuk ke dalam Kategori Sangat Baik. Capaian ini bukan hanya tentang pemenuhan indikator teknis, tetapi tentang keberhasilan menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan, aman, dan berorientasi pada pengguna

Untuk kedepannya Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkomitmen untuk meningkatkan nilai Evaluasi SPBE dengan melakukan pemetaan tugas untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh aplikasi terintegrasi SPBE dan mengumpulkan data pendukung sebagai bahan evaluasi.

C. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2025 sebesar 87,01% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran persasaran, penyerapan anggaran pada Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp. 491,715,902,- atau 79,11%. Program Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 14,343,843,455,- atau 88,21% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp.1,028,107,721,- atau 76,24%

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran Pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19. Realisasi Anggaran tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN & SUB KEGIATAN			TARGET	REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI (%)
				Anggaran	Anggaran		Anggaran
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintrahan Daerah Provinsi			952,247,201	942,892,434	9,354,767	99.02
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		121,303,720	104,811,267	16,492,444	86,40
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44,155,600	42,000,000	2,155,600	95,12
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17,484,840	17,484,840	-	100.00
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18,513,040	14,981,250	3,531,790	80,92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,908,720	2,903,936	4,783	99,84
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,300,000	-	2,300,000	0,00
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,181,520	21,681,250	8,500,270	71,84
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,760,000	5,760,000	-	100
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,712,816	322,000	1,390,816	18,80
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	787,536	-	787,536	00,0
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	925,280	322,000	603,280	34,80
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		168,599,320	150,986,130	17,613,190	89,55
		10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	168,599,320	150,986,130	17,613,190	89,55
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		670,334,427	425,046,023	245,288,404	63,41
		11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152,574,000	99,498,900	53,075,100	65,21
		12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,435,084	11,068,800	6,366,284	63,49
		13	Penyediaan Bahan/Material	30,714,932	29,714,872	1,000,060	96,74
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351,866,891	266,763,451	85,103,440	75,81
		15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Brbasis Elektronik	117,743,520	18.000.000	99,743,520	15,29
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		217,014,400	198,733,238	18,281162	91,58
		16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217,014,400	198,733,238	18,281162	91,58
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		182,612,540	158,209,054	24,403,486	86,64
		15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,342,540	88,589,054	7,483,486	92,23
		16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,270,000	18,373,000	897,000	95,35
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67,000,000	50,977,000	16,023,000	76,09
B.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah			**621,552,589**	**491,715,902**	129,836,687	79,11
	1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		224,265,398	194,019,940	30,245,458	86,51
		1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	150,658,040	134,111,120	16,546,920	89,02
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	30,857,730	22,554,730	8,303,000	73,09
		3	Fasilitasi Penataan Wilayah	42,749,628	37,354,090	5,395,538	87,38
	2	Pelaksanaan Otonomi Daerah		289,510,241	256,516,016		88,60
		4	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	116,930,353	88,120,828	28,809,525	75,36
		5	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	172,579,888	168,395,188	4,184,700	97,58
	3	Fasilitasi Kerjasama Daerah		107,776,950	41,179,946	66,597,004	38,71

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		6	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	69,110,230	26,354,730	42,755,500	38,13
		7	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	14,137,040	13,771,536	365,504	97,41
		8	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	24,529,680	1,053,680	23,476,000	4,30
C.	Program Kesejahteraan Rakyat			**16,260,385,709**	**14,343,843,455**	1,916,542,254	88,21
	1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		7,337,951,846	7,073,032,680	264,919,166	96,39
		1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	872,308,595	871,175,510	1,133,085	99,87
		2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	6,465,643,251	6,201,857,170	263,786,081	95,92
	2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		40,111,672	39,011,285	1,100,387	97.26
		3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	40,111,672	39,011,285	1,100,387	97.26
	3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		8,922,433,863	7,270,810,775	1,651,623,088	81,49
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	6,833,630,486	5,195,390,145	1,638,249,343	76,03
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,olahraga, kebudayaan dan pariwisata	26,235,297	17,530,708	8,704,589	66,82
		6	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	2,062,568,080	2,057,889,924	4,678,156	99,77
T O T A L				18,243,515,521	15,873,667,078	2,369,848,443	87,01

Dari tabel diatas APBD Biro Pemkesra di Tahun 2025 Sebesar Rp. 18,243,515,521 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 15,873,667,078,- dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 2,369,848,443,- dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 87,01%.

Berdasarkan uraian di atas ada sejumlah hal yang perlu diapresiasi yakni capaian kinerja bisa tercapai cukup baik meskipun beberapa sub kegiatan serapan anggarannya rendah. Artinya ada optimalisasi pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan efisien. serapan anggaran yang rendah sehingga dibeberapa sub kegiatan pada Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat akibat sejumlah kendala sistem yang secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi dan akibat efisisensi anggaran besar-besaran yang diwajibkan bagi seluruh Perangkat Daerah sesuai kebijakan Pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peningkatan capaian Kinerja juga terjadi pada Kegiatan Fasilitasi beasiswa Pendidikan Tinggi terkait pengelolaan dana Bantuan Beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah provinsi melalui Biro Pemerintahan dan Kesejhateraan Rakyat dan anggaran tersebut di tempatkan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan dasar. Dukungan penuh dari Gubernur Sulawesi Barat serta bantuan Tim TPID Sulawesi barat sehingga adanya tambahan anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap program penerima beasiswa ini. Salah satu program beasiswa tahun 2025 yakni kerja sama afirmasi dengan Kampus seperti UNIMAJU, STAIN, UGM, UNSULBAR dan beberapa kampus lain dengan penjajakan kuota khusus untuk jurusan Kedikteran dan program strategis lainnya yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM bagi mahasiswa berperstasi dan kurang mampu.

Namun secara keseluruhan baik dari Bidang Pemerintahan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat, perbandingan antara capaian kinerja dengan penggunaan anggaran menunjukkan bahwa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah bekerja secara efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025.Hal ini menjadi wujud dari tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerint (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petujuk teknis Perjanjian Kinerja, dan tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan, dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan dan Kesra telah menunjukkan performa yang sangat baik dalam mencapai target-target strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hasil evaluasi Kinerja Biro Pemerintah berdasarkan perhitungan Rata-rata dari persentase capaian masing-masing Indikator Kinerja yakni 94,15% dengan Interpretasi Memuaskan.

capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi Indikator kinerja telah terlaksana dengan baik serta menunjukkan bahwa Biro Pemkesra tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi mampu melakukan akselerasi pada layanan administrasi Pemerintahan dan Layanan Kesejahteraan Rakyat dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 ini menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun anggaran 2025 Selain itu laporan ini menyajikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan capaian atas masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum sebagian besar dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan Nilai 9 kategori AA, Sangat Memuaskan. Dan diperlukan langkah-langkah dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disusun, sehingga di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masa mendatang indikator kinerja dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan hambatan-hambatan yang dialami bisa dikendalikan dan tertangani dengan baik.

4.2 Saran

1. Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, hendaknya dapat terus disempurnakan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi.
2. Penyebarluasan dan implementasi secara nyata pelaksanaan berbagai kegiatan dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan
3. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
4. Perlu upaya-upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi (LKJiP) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang menggambarkan capaian kinerja tiap – tiap sasaran pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 25 Februari 2026

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

MURDANIL, SE., M.A.P
Pembina/ (IV/a)
NIP. 198101102009021003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).